

**ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN  
PADA KANTOR INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Periode 2017 - 2020**

**Mokhammad Fadli<sup>1</sup>, Imam Nazarudin Latif<sup>2</sup>, Ida Rachmawati<sup>3</sup>**  
**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**  
**Email : [fjengky@gmail.com](mailto:fjengky@gmail.com)**

---

***Keywords :***

Efisiensi, Efektifitas,  
Anggaran belanja,  
kinerja keuangan

***ABSTRACT :*** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan pada kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi dan rasio efektifitas. Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif dalam hal ini data kuantitatif yang digunakan adalah ringkasan laporan realisasi anggaran (APBD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data ini diambil langsung dari sumber datanya yaitu kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian antara lain pengelolaan kinerja keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur periode 2017 sampai dengan 2020 cukup efektif berada di level 95% sampai 99 % dan tingkat efisiensi belum maksimal berada di antara 104 % sampai 88%. Kinerja keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2020 cukup efektif dikarenakan serapan dan pengelolaan anggaran belanja langsung sesuai dengan target dan tujuan sedangkan pengelolaan anggaran belanja tidak langsung masih belum efisien hal ini karena dipengaruhi oleh pengelolaan belanja pegawai yang belum maksimal.

---

**PENDAHULUAN**

Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai pelaksana otonomi daerah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan Undang - Undang No.22 tahun 1999 yang berlaku. Untuk menilai kinerja pemerintah daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan daerah dapat dilihat melalui laporan keuangan, kemudian digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kinerja keuangan dalam hal penyerapan anggaran.

Menurut Dadang Prasetyo Jatmiko (2017:1) : “manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahannya, pemantauan, pengorganisasian dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan “. Sedangkan menurut James C. Van Horne dan Jhon M. Wachowicz, Jr alih bahasa Heru Sutojo (2012:2) : “Manajemen Keuangan berkaitan dengan perolehan, pendanaan dan manajemen aset dengan didasari beberapa tujuan umum”. Pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan efisien dan efektif dapat mendorong perekonomian daerah dalam penyerapan anggaran di berbagai sektor - sektor yang produktif dan dengan potensi yang dimiliki dengan tepat, sehingga meningkatkan otonomi keuangan dan otonomi daerah secara keseluruhan.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tujuan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi Kalimantan Timur dapat tercapai secara efektif dan efisien. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menjalankan tugas pokoknya, tentu harus berdasar pada sumber dana, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin sehingga dapat terwujud efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran baik dari sudut produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan pengawasan kepada OPD lainnya terhadap kepatuhan undang – undang.

Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pokok tersebut, tentu harus berdasar pada sumber dana, sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin sehingga dapat terwujud efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran, baik dari sudut produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan undang – undang.

Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan daerah dapat dilihat melalui laporan keuangan, kemudian digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kinerja keuangan dalam hal penyerapan anggaran. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tujuan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen berperan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Efisiensi dan efektifitas merupakan ukuran pada organisasi untuk mencapai alur kerja yang lebih baik dalam pelaksanaan kinerja. Kinerja merupakan perbandingan yang paling jelas antara pekerjaan yang diselesaikan dengan hasil yang diperoleh dari pekerjaan tersebut,

baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga kinerja yang baik di pengaruhi oleh alur kerja yang efektif dan efisien.

Menurut Sedarmayanti (2014:22) “Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat” sedangkan menurut Ravianto (2014:11) “Pengertian efektifitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan”.

Menganalisa efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan adalah salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kinerja yang di rangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis efisiensi dan efektifitas kinerja keuangan pada kantor Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini bersifat kuantitatif. Dalam hal ini data kuantitatif yang digunakan adalah ringkasan laporan realisasi anggaran (APBD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. Data ini diambil langsung dari sumber datanya yaitu kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

### **2. Uji Instrumen Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data skunder yaitu berupa Laporan Keuangan Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2017 – 2020 guna mendapatkan data data yang diperlukan untuk menguji kinerja keuangan apakah dalam pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien.

### **3. Alat analisis.**

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kuantitatif, yaitu analisis Laporan Keuangan Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan 2020 yang menggambarkan kinerja keuangan dalam penggunaan anggaran belanja secara efisiensi dan efektivitas, dengan menggunakan beberapa alat analisis rasio seperti:

### 1. Rasio efisiensi

Rumus pengukuran rasio Efisiensi adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja tidak langsung}}{\text{Anggaran belanja tidak langsung}} \times 100\%$$

(sumber : I.Pangkey.2015, Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Hal 37)

### 2. Rasio efektifitas

Rumus pengukuran rasio Efektifitas adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\%$$

(sumber : I.Pangkey.2015, Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Hal 38)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Dan Perhitungan Efisiensi

Untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran belanja tidak langsung kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah dari perbandingan antara total anggaran belanja tidak langsung dan realisasi anggaran belanja tidak langsung yang dapat dilihat dalam tabel 1.1.

Pengukuran efisiensi anggaran belanja tidak langsung dilakukan dengan membagi target anggaran belanja tidak langsung dengan total realisasi anggaran belanja tidak langsung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi belanja tidak langsung}}{\text{Anggaran belanja tidak langsung}} \times 100\%$$

(Sumber : I.Pangkey.2015, Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Hal 38)

## a) Perhitungan tingkat Efisiensi tahun anggaran 2017

Target anggaran belanja tidak langsung tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 8.945.791.000,00 dan realisasi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.289.135.854,00

$$\text{Efisiensi} = \frac{8.289.135.854,00}{8.945.791.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 92,66 \%$$

## b) Perhitungan tingkat Efisiensi tahun anggaran 2018

Target belanja tidak langsung tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 9.638.955.408,00 dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 8.994.722.549,00.

$$\text{Efisiensi} = \frac{8.994.722.549,00}{8.638.955.408,00} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 104,12\%$$

## c) Perhitungan tingkat Efisiensi tahun anggaran 2019

Target belanja tidak langsung tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 11.263.445.000,00 dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 10.309.848.154,00.

$$\text{Efisiensi} = \frac{10.309.848.154,00}{11.263.445.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 91,53 \%$$

## d) Perhitungan tingkat Efisiensi tahun anggaran 2020

Target belanja tidak langsung tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 12.978.960.000,00 dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.244.258.129,00.

$$\text{Efisiensi} = \frac{11.244.258.129,00}{12.978.960.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 86,63 \%$$

**Tabel 1. : Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Tidak Langsung Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.**

No	Tahun	Belanja Tidak Langsung		Tingkat Efisiensi	Keterangan
		Target	Realisasi		
A	B	C	D	$E = \frac{D}{C} \times 100$	F
1	2017	8.945791.000	8.289.135.854	92,66%	Kurang Efisien
2	2018	8.994.722.549	8.638.955.408	96,04%	Kurang Efisien
3	2019	11.263.445.000	10.309.848.154	91,53%	Kurang Efisien
4	2020	12.978.960.000	11.244.258.129	86,63%	Cukup Efisien

(sumber : data olahan)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi anggaran belanja tidak langsung Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami turun naik hal ini disebabkan adanya fluktuasi realisasi anggaran belanja tidak langsung dari tahun 2017 sampai dengan 2020, di tahun 2017 mencapai 92,66 %, lebih kecil persentasinya jika dibandingkan tingkat efisiensi di tahun 2018 mencapai 96,04% yang artinya ada penurunan tingkat efisiensi walaupun masih dalam golongan kurang efisien, tingkat efisiensi di tahun 2019 mengalami penurunan persentase yaitu mencapai 91,53% yang artinya adanya peningkatan tingkat efisiensi tetapi masih dalam golongan kurang efisien, tingkat efisiensi tahun 2020 mengalami penurunan yaitu mencapai 86,63% yang artinya ada peningkatan tingkat efisiensi dari kurang efisien menjadi cukup efisien. Secara keseluruhan tingkat efisiensi kinerja keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur kurang efisien sehingga hipotesis ditolak.

## 2. Analisis dan Perhitungan Efektifitas

Untuk menganalisis tingkat efektifitas anggaran belanja langsung kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur adalah dari perbandingan antara total anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja langsung yang dapat dilihat dalam tabel 1.2

Pengukuran efektifitas anggaran belanja langsung dilakukan dengan membagi realisasi anggaran belanja langsung dengan target anggaran belanja langsung. Perhitungan tingkat Efektifitas dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi anggaran belanja langsung}}{\text{Target anggaran belanja langsung}} \times 100\%$$

(Sumber : I.Pangkey.2015, Jurnal EMBA Vol.3 No.4 Hal 37)

a) Perhitungan tingkat efektifitas tahun 2017 :

Target anggaran belanja langsung tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 7.100.000.000,00 dan realisasi belanja langsung sebesar Rp. 6.898.948.035,00.

$$\text{Efektifitas} = \frac{6.898.948.035,00}{7.100.000.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 97,17\%$$

b) Perhitungan tingkat efektifitas tahun 2018 :

Target belanja langsung tahun anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 7.965.600.000,00 dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 7.955.715.982,00

$$\text{Efektifitas} = \frac{7.955.715.982,00}{7.965.600.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 99,88 \%$$

c) Perhitungan tingkat efektifitas tahun 2019 :

Target belanja langsung tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 14.738.590.000,00 dengan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 14.562.118.956,00.

$$\text{Efektifitas} = \frac{14.562.118.956,00}{14.738.590.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Efektifitas} = 98,80 \%$$

d) Perhitungan tingkat efektifitas tahun 2020 :

Target belanja langsung tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 9.909.806.592,50 dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 9.504.880.686,00

$$\text{Efektifitas} = \frac{9.504.880.686,00}{9.909.806.592,50} \times 100\%$$

Efektifitas = 95,91 %

**Tabel 2.: Tingkat Efektifitas Anggaran Belanja Langsung Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.**

No	Tahun	Belanja Langsung		Tingkat Efektifitas	Keterangan
		Target	Realisasi		
A	B	C	D	E= (D/C)*100%	F
1	2017	7.100.000.000,00	6.898.948.035,00	97,17 %	Efektif
2	2018	7.965.600.000,00	7.955.715.982,00	99,88 %	Efektif
3	2019	14.738.590.000,00	14.562.118.956,00	98,80 %	Efektif
4	2020	9.909.806.592,50	9.504.880.686,00	95,91 %	Efektif

(sumber : data olahan)

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas anggaran belanja langsung Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 secara keseluruhan efektif. Tingkat efektifitas di tahun 2017 mencapai 97,17% % lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat efektifitas di tahun 2018 mencapai 99,88 % , tingkat efektifitas di tahun 2019 mencapai 98,80 % lebih tinggi atau mengalami peningkatan prosentasi jika dibandingkan dengan tahun 2018 tingkat efektifitas tahun 2020 mencapai 95,91 % mengalami penurunan tingkat prosentasi jika dibandingkan dengan tahun 2019. Secara keseluruhan tingkat efektifitas kinerja keuangan Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur cukup efektif sehingga hipotesis diterima.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan pada kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dapat di lihat dari hasil pengukuran sebagai berikut :



1. Tingkat efektifitas atau kriteria efektifitas anggaran belanja langsung pada kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017-2020 mempunyai kriteria efektifitas yang bervariasi. Tingkat efektifitas tertinggi pada tahun 2018 dan yang terendah terjadi pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa efektifitas kinerja keuangan sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, selama kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Tingkat efisiensi atau kriteria efisiensi anggaran belanja tidak langsung pada kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2017 – 2020 juga mengalami turun naik dalam tingkat efisiensinya, tingkat efisiensi tertinggi dicapai pada tahun 2020 dan tingkat terendah dicapai pada tahun 2018. Kenaikan dan penurunan tingkat efisiensi pada belanja tidak langsung sangat dipengaruhi oleh pengelolaan belanja pegawai yang menyerap anggaran belanja tidak langsung artinya semakin sedikit tingkat realisasi belanja tidak langsung terhadap target belanja tidak langsung maka semakin besar tingkat efisiensinya, tentunya hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan pengelolaan pegawai pada kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur.

### **Saran**

Untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat melakukan Analisis Kinerja Keuangan pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur dengan menggunakan Rasio Keserasian, Rasio Belanja Rutin terhadap APBD, Rasio Belanja Modal terhadap APBD.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2003.Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 *tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Sekretariat Negara
- Jatmiko, Dadang Prasetyo. 2017. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta : Diandra Kreatif
- Pangkey, Immanuel, 2015. *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/10581>.diakses pada hari Jum'at, 16 Oktober 2020, jam 17.00
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara
- Sedarmayanti, 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.
- Van Horne, James C. & Jhon M. Wachowicz, Jr. 2012. Prinsip - Prinsip Manajemen Keuangan, Buku 2 Edisi 13. Terjemahan Heru Sutojo. Jakarta : Salemba Empat